

IMBAS COVID-19, PEMANGKASAN ANGGARAN TIDAK BISA DIHINDARI

Ni Putu Astiti

*Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
putuastiti40@gmail.com*

Abstrak.

Anggaran adalah sebuah rencana kerja yang disusun meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Penyusunan anggaran merupakan suatu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh satuan kerja atau instansi pemerintah sebelum memasuki tahun anggaran, mulai dari instansi vertikal di daerah hingga tingkat kementerian/ Lembaga negara. Suatu kejadian yang tidak terduga terjadi di bulan Desember 2019, tersebarnya virus COVID-19 di seluruh dunia. Dan Virus COVID-19 mulai menyebar di wilayah Indonesia sekitar bulan Maret 2020, sehingga membuat pemerintah mengambil kebijakan – kebijakan baru seperti halnya pemangkasan anggaran APBN untuk dialokasikan ke dana bantuan penanggulangan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemangkasan anggaran, dampak yang ditimbulkan dan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan dari pemangkasan anggaran akibat COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif. Akibat adanya COVID-19 ini pemerintah harus memangkas anggaran dan dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Pemangkasan anggaran menjadi pilihan pemerintah untuk bisa membantu masyarakatnya yang terkena dampak dari pandemic COVID-19. Proses pemangkasan anggaran dilakukan dengan cara tidak mencairkan anggaran yang semestinya dari APBN ke APBD. Kemudian OPD bisa menyesuaikan pelaksanaan kegiatan merujuk ke anggaran yang jumlahnya sedikit yang telah dikucurkan oleh pemerintah. Berbagai upaya telah dikerahkan pemerintah dari himbau sampai bantuan. Pemangkasan anggaran dilakukan kepada kegiatan yang melibatkan banyak orang dan semua Anggaran yang sifatnya tidak mendesak atau ditunda.

Kata kunci: Realokasi dana, penanggulangan virus, prioritas utama.

Abstract.

A budget is a work plan prepared covering all company activities which are stated in units that are valid for a certain period of time. Budget preparation is an activity that is routinely carried out by work units or government agencies before entering the fiscal year, starting from vertical agencies in the regions to the level of ministries / state agencies. An unexpected event occurred in December 2019, the spread of the COVID-19 virus around the world. And the COVID-19 virus began to spread in Indonesian territory around March 2020, prompting the government to adopt new policies such as cutting the APBN budget to be reallocated to aid funds for COVID-19 countermeasures. This study aims to determine the process of cutting budgets, the impact they have on and the role of the government in overcoming the problems of cutting budgets due to COVID-19. The research method used is qualitative methods. As a result of the COVID-19, the government must cut the budget and allocate it to help people affected by COVID-19. Budget cuts are the government's choice to be able to help people affected by the COVID-19 pandemic. APBD. Then OPD can adjust the implementation of activities referring to the small budget that has been disbursed by the government. Various efforts have been made by the government, from appeals to assistance. Budget cuts are made for activities that involve many people and all budgets that are not urgent or postponed.

Keywords: Fund reallocation, virus control, top priority.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan anggaran merupakan suatu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh

satuan kerja atau instansi pemerintah sebelum memasuki tahun anggaran, mulai dari instansi vertikal di daerah hingga tingkat kementerian/ Lembaga negara. Anggaran adalah sebuah rencana kerja yang

disusun meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran juga adalah sebuah rencana kerja yang direncanakan di masa mendatang dan disetujui. (Chelsea, 2017). Penentuan tujuan suatu anggaran merupakan tanggung jawab pimpinan atau manajer (Amril, 2014).

Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Pemerintah harus mengelola APBN seprofesional mungkin. Seperti di situasi sekarang adanya virus corona yang menyebar di seluruh dunia. Corona Virus Identification 2019 (COVID-19) pertama kali muncul di daerah Wuhan di Negara Cina. Penyebarannya cepat sekali, yaitu melalui udara yang menyerang pernapasan. Tanda-tanda seseorang terinfeksi COVID-19 adalah suhu tubuh naik, demam, mati rasa, batuk, nyeri di tenggorokan, kepala pusing, susah bernafas jika virus corona sudah sampai paru-paru (Yuliana, 2020).

Dalam menghadapi situasi pandemi corona pemerintah harus bisa mengelola anggaran seefektif mungkin. Oleh karena itu pemerintah melakukan pemangkasan anggaran terhadap beberapa kegiatan dan anggaran dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi virus corona. Pemangkasan anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Pemotongan anggaran ini tentunya akan berdampak pada kegiatan operasional kementerian atau Lembaga. Jenis-jenis kegiatan yang ditunda atau dibatalkan yakni kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas yang tidak terkait dengan penanggulangan COVID-19 Semuanya ditunda seperti perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, belanja belanja lain.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana proses pemangkasan anggaran, dampak yang ditimbulkan dan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan dari pemangkasan anggaran COVID-19?

Tujuan

Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui proses pemangkasan anggaran, dampak yang ditimbulkan dan peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan dari pemangkasan anggaran akibat COVID-19

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Anggaran

Anggaran adalah keseluruhan rincian biaya mengenai pendapatan dan belanja yang umumnya disusun rutin setiap tahun oleh suatu organisasi sebagai suatu alat perencanaan maupun pengendalian. Anggaran merupakan sebuah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi atau instansi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu umumnya untuk satu tahun (Irsutami, 2014). Aspek dari penganggaran merupakan lanjutan dari aspek perencanaan, karena penganggaran merupakan suatu proses menyusun atau menyiapkan anggaran yang dinyatakan dalam ukuran finansial secara sistematis untuk mencapai tujuan selama periode tertentu menurut (Munifa, 2017). Partisipasi Anggaran dalam pemerintahan menunjukkan pada seberapa besar partisipasi aparat pemerintah daerah/ pusat dalam memahami anggaran yang telah diusulkan untuk meningkatkan kinerja organisasi (Wulandari, 2013). Anggaran juga merupakan pernyataan formal yang dibuat

oleh manajemen tentang pelaksanaan rencana-rencana masa akan datang pada periode tertentu (Bestari Dwi Handayani, 2011).

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan dari postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020

Fungsi Anggaran Menurut (Chairul, 2012) ada beberapa Fungsi Anggaran diantaranya adalah:

1. Fungsi perencanaan yaitu sebelum suatu perusahaan melakukan operasionalnya, pimpinan dari perusahaan tersebut harus lebih dahulu merumuskan suatu kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan adanya suatu rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik.
2. Fungsi Pengawasan Anggaran merupakan salah satu usaha-usaha yang ditempuh supaya rencana yang telah disusun sebelumnya dapat tercapai. Tujuan pengawasan itu bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan.
3. Fungsi koordinasi bahwa untuk dapat menciptakan adanya koordinasi yang diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya.
4. Fungsi Anggaran Sebagai Pedoman Kerja Anggaran merupakan salah satu

rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit 2 moneter.

Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 atau untuk menghadapi ancaman yang cukup membahayakan perekonomian nasional maka dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian dari APBN Tahun Anggaran 2020

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau suatu perilaku objek tertentu yang bisa diamati oleh peneliti (Atmaja, 2012). Untuk menunjang penelitian dengan jenis kualitatif, dibutuhkan data yang merupakan sekumpulan nilai dan fakta yang dikumpulkan melalui pengumpulan data yang sah (Sugiyono, 2014). Ada dua data yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Data Primer data yang dikumpulkan dan diperoleh dengan melakukan observasi langsung di lapangan serta melakukan wawancara kepada narasumber, seperti staf perencana dan staf pengelola keuangan (Yaniawati, 2020). Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui buku-buku dan sejenisnya sebagai referensi yang relevan dengan penelitian (Yaniawati, 2020). Data diperoleh dari buku, artikel, Jurnal, Modul dan bahan bacaan lainnya tentunya yang memberikan pemikiran yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan dan menambah wawasan umum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memangkas atau memotong anggaran Kementerian dan Lembaga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempersiapkan amunisi yang cukup untuk melawan virus COVID-19. Pemangkasan anggaran oleh pemerintah harus dilakukan, untuk menyelamatkan perekonomian di Indonesia. Dimana di masa pandemic COVID-19 banyak anggaran terutama yang melibatkan orang banyak tidak dapat terserap atau terealisasi sehingga lebih baik memang jika dialihkan untuk penanganan COVID-19.

- a. Proses Pemangkasan Anggaran
Proses pemangkasan anggaran dilakukan dengan cara tidak mencairkan anggaran yang semestinya dari APBN ke APBD. Kemudian OPD bisa menyesuaikan pelaksanaan kegiatan merujuk ke anggaran yang jumlahnya sedikit yang telah dikurirkan oleh pemerintah.
- b. Dampak dari pemangkasan anggaran
Penyebaran COVID-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata. Seperti dalam pemerintahan dampak dari pemangkasan anggaran ini sangat jelas terlihat. Banyak kegiatan tidak bisa terlaksana sesuai dengan program yang sebelumnya sudah direncanakan dengan matang seperti kegiatan focus group diskusi, kegiatan workshop dan lain sebagainya yang sementara ditunda atau bisa dialihkan menjadi daring sehingga dapat menghemat anggaran. Ada beberapa jenis-jenis kegiatan yang ditunda atau dibatalkan yaitu kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas yang tidak terkait dengan penanggulangan COVID-19 misalnya perjalanan dinas dilakukan dengan pengadaan tempat cuci tangan, pengadaan *hand sanitizer* dan lain sebagainya. Kegiatan yang melibatkan

orang banyak semuanya dipangkas dan ada beberapa yang ditunda. Beberapa anggaran yang dipangkas seperti perjalanan dinas, Stadium General, Seminar, Workshop, Pesta Kesenian Bali, Pameran pembangunan, temu karya ilmiah dan kegiatan sejenis. Pemangkasan anggaran ini juga berdampak pada staf keuangan dalam pengelolaan anggaran. Banyak masalah yang timbul dari pemangkasan anggaran seperti kegiatan seminar atau webinar yang sudah terlaksana seharusnya narasumber bisa dibayarkan tetapi karena sudah ada pemangkasan anggaran tidak bisa dibayarkan. Disamping itu serapan anggaran menjadi rendah dengan berkurangnya banyak kegiatan. Walaupun demikian ada beberapa kegiatan yang tidak kena pemangkasan anggaran yaitu belanja untuk penanggulangan dampak COVID-19, serta belanja pegawai, layanan dan operasional perkantoran, pembinaan peserta didik, penelitian dan pengadaan sarana dan prasarana.

Kode	Uraian	Jumlah Sebelum Pemangkasan	Jumlah Setelah Pemangkasan	Keterangan
1	2	3	4	5
AA	Pelayanan Perkantoran	37,500,000	37,500,000	Tidak Terkena
AB	pemeliharaan Gedung/ Bangunan	30,170,000	30,170,000	Tidak Terkena
BA	Honorarium Pada Jurusan Teologi FBW	144,775,000	144,775,000	Tidak Terkena
BB	Honorarium Pada Jurusan Filsafat FBW	116,575,000	116,575,000	Tidak Terkena
BC	Honorarium FBW Jur Yoga dan Kesehatan	183,275,000	183,275,000	Tidak Terkena
CA	Bahan Proses Pembelajaran	35,000,000	35,000,000	Tidak Terkena
DA	Jurnal FBW	78,180,000	78,180,000	Tidak Terkena
EA	Stadium General FBW	31,070,000	-	Terkena
EB	Seminar Nasional FBW	29,094,000	-	Terkena
FA	Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Brahma Widya	61,902,500	61,902,500	Tidak Terkena
FB	Beasiswa Berprestasi & Kurang Mampu FBW	325,000,000	325,000,000	Tidak Terkena
GA	Workshop Penyempurnaan Pedoman Skripsi	16,585,000	-	Terkena
GB	Workshop Penyempurnaan Pedoman Skripsi	19,682,000	-	Terkena
GC	Workshop Penyempurnaan Pedoman Skripsi	19,682,000	-	Terkena
HA	Perjalanan Dinas FBW	27,628,000	-	Terkena

Gambar 1. Ilustrasi Dana Kegiatan Yang Dipangkas



Gambar 2. Ilustrasi dalam bentuk grafik

- c. Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan dari pemangkasan anggaran.

Perkembangan teknologi di zaman modern semakin meningkat. Sudah sejak lama mampu memfasilitasi orang-orang untuk saling berkomunikasi melalui tatap muka melalui media telekomunikasi, diantaranya yang paling populer video call atau video conference. Dengan kemudahan dari teknologi tersebut, seharusnya tidak sulit bagi pemerintah untuk memangkas perjalanan dinas. Apalagi pada saat ini terjadi keadaan darurat seperti sekarang ini. Seperti anjuran dari pemerintah untuk membatasi kerumunan, kegiatan yang melibatkan orang banyak dialihkan menjadi daring dengan zoom dan webinar. Dan untuk kedepannya agar disediakan anggaran dalam penanggulangan COVID-19.

- d. Peran pemerintah dalam menanggulangi COVID-19

Dengan adanya pemangkasan anggaran, yang nantinya anggaran ini dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19. Ada peran pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 yaitu:

1. Dengan memberi anjuran kepada masyarakat untuk mematuhi protocol kesehatan dan membatasi aktivitas di luar rumah;
2. Menyediakan sarana prasarana pencegahan penyebaran COVID-19, seperti tempat cuci tangan, desinfektan, *hand sanitizer*, *face shield*, masker, dls

3. Menggerakkan Tim Keamanan wilayah untuk menjaga keamanan di titik perbatasan wilayah,
4. Mengadakan rahasia masker dalam upaya pencegahan COVID-19.

Disamping peran pemerintah dalam penanggulangan COVID-19, pemerintah juga memberikan bantuan yang diberikan untuk masyarakat sekitar yang berdampak COVID-19

Bantuan pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Bantuan ini akan meringankan beban masyarakat di masa pandemic COVID-19. Adapun bantuan yang diberikan baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sembako, masker, *hand sanitiser*, memberikan bantuan pada mahasiswa di luar Bali, pegawai tidak tetap dan pegawai golongan II ke bawah serta bantuan kuota internet untuk mahasiswa untuk mendukung perkuliahan secara daring.

KESIMPULAN

Akibat adanya COVID-19 ini pemerintah harus memangkas anggaran dan dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Pemangkasan anggaran menjadi pilihan pemerintah untuk bisa membantu masyarakatnya yang terkena dampak dari pandemic COVID-19. Berbagai upaya telah dikerahkan pemerintah dari himbau sampai bantuan. Pemangkasan anggaran dilakukan kepada kegiatan yang melibatkan banyak orang dan semua Anggaran yang sifatnya tidak mendesak, ditunda.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, R. (2012). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dengan dimoderasi oleh variabel desentralisasi

- dan budaya organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi*, 20(03).
- Amril, V. N. (2014). Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Atmaja. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*. Singaraja : IKIP Negeri.
- Aulia Syahadatun Dinuriah (2020). “Apa yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah?” *Journal of Business and Information System* , Vol 2, No.1, ISSN: 2685-2543
- Bestari Dwi Handayani (2011). Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggara Dan (Studi Empiris pada Kabupaten Semarang). *JEJAK*. Vol 4. No. 1
- Chairul Anwar, Yunita S., Tina M.B. (2012). *Analisis Pengguna Anggaran Biaya Administrasi Umum dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor* (Studi Empiris pada PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung)
- Chelsea P., Inggriani E., Stanley K. W. (2017). Evaluasi penyusunan anggaran dan kinerja keuangan (Studi Empiris pada Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2), 661-670
- H. Munandar Dadang.2011.*E-Business*.CV ANDI OFFSET.Yogyakarta
- Irsutami, Printasani (2014). Penyusunan Anggaran Discretionary Expenses (Studi Empiris pada PT Anshun Joyful T & T). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Vol. 2, No.2, ISSN: 2337-7887
- Munifa M (2017). Analisis.Sistem Dan Prosedur Penganggaran Dalam Peningkatan Efektivitas Anggaran. E *Jurnal Katlogis*, Volume 5 Nomor 7, 136-146. ISSN: 2302-2019
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang *perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020*
- Sari, L. P. D. M., Adiputra, I. M. P., & Yuniarta, G. A. (2014). *pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
- Silpa H. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jornal Education Psychology and Counseling* Volume 2 Nomor 1. ISSN Online: 2716-4446
- Setyawan, Ariyanto dan Rohman, Abdul. 2013. “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Mediasi Komitmen Organisasi dan Kecukupan Anggaran”. *Journal Accounting undif*, Volume 2, Nomor 3, Halaman 1, ISSN (Online): 2337-3806.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (R&D)*. Cetakan ke-19. Alfabeta CV. Bandung.
- Syafrida, Ralang H (2020). Bersama Melawan Virus COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar- I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No.6. pp. 495-508. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15325
- Wulandari, N. (2013). pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kota Padang).
*Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*, 1(1).

Yaniawati, 2012. *Metode Penelitian*.
Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Yuliana. (2020). CoronaVirus diseases
(Covid-9) sebuah tinjauan literatur.

Wellness And Healthy Magazine Vol 2
No.1. Hal 187-192. ISSN Online:
2656-0062.

Zahrudin, Zainul a., Achmad S. (2019).
Implementasi Penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah. *Jurnal Administrasi
Pendidikan*. Volume 26. Hal 46-56

